



Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal di Inspektorat Kabupaten Jember

Hersa Farida Qoriani^{1*}, Tira Anggraini², Novita Ayu Safitri³, Nila Varadisa⁴

¹⁻⁴Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi : laksmanadwikuncoro@gmail.com

Abstract. *This research aims to comprehensively analyze the role of organizational communication in improving the effectiveness of internal supervision at the Jember Regency Inspectorate. The study also emphasizes how communication patterns contribute to strengthening coordination between structural units in supervisory practices. Utilizing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving leadership and auditors, allowing for a rich and contextual understanding of supervisory processes. The results indicate that organizational communication serves as a significant booster factor for supervisory effectiveness. Transparent information flow enhances auditor comprehension, while the regulative function ensures compliance with Standard Operating Procedures (SOP). These communication mechanisms also support consistency in implementing supervisory tasks across different units. Furthermore, persuasive and integrative communication proved effective in reducing resistance from supervision objects, thereby fostering a dialogic and conducive working environment and improving mutual understanding between stakeholders. The study concludes that the integration of sound communication management is an absolute prerequisite for establishing clean and transparent government governance, particularly in strengthening accountability and public sector performance within local government institutions.*

Keywords: Internal Supervision; Jember Regency Inspectorate; Organizational Communication; Qualitative Approach; Transparent Governance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal di Inspektorat Kabupaten Jember. Penelitian ini juga menekankan bagaimana pola komunikasi berkontribusi dalam memperkuat koordinasi antarunit struktural dalam praktik pengawasan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pimpinan serta auditor, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual mengenai proses pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap efektivitas pengawasan, di mana aliran informasi yang transparan meningkatkan pemahaman auditor, sementara fungsi regulatif memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, mekanisme komunikasi tersebut juga mendukung konsistensi pelaksanaan tugas pengawasan di berbagai unit kerja, serta komunikasi yang bersifat persuasif dan integratif terbukti efektif dalam mengurangi resistensi dari objek pengawasan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dialogis, kondusif, dan meningkatkan saling pengertian antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya, integrasi manajemen komunikasi yang baik merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja sektor publik di lingkungan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan; Inspektorat Kabupaten Jember; Komunikasi Organisasi; Pendekatan Kualitatif; Tata Kelola Transparan.

1. PENDAHULUAN

Komunikasi dalam dinamika organisasi modern bukan sekadar instrumen pertukaran informasi, melainkan merupakan "nyawa" atau core element yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan pencapaian visi strategis. Dalam perspektif manajemen komunikasi, efektivitas sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana pesan-pesan organisasional dikelola untuk menggerakkan sumber daya manusia menuju tujuan yang sama. Sebagai sistem yang saling terkait, komunikasi organisasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sub-sistem di dalamnya, sehingga koordinasi antar-unit dapat berjalan harmonis.

Tanpa pola komunikasi yang terstruktur, organisasi akan menghadapi risiko disintegrasi, rendahnya produktivitas, dan kegagalan dalam merespons tantangan lingkungan eksternal maupun internal. (Fauzan Ahmad Siregar, 2021)

Secara teoretis, peran komunikasi dalam organisasi mencakup empat fungsi utama yang sangat krusial: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Fungsi informatif memungkinkan aliran data yang akurat untuk pengambilan keputusan, sementara fungsi regulatif memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Di sisi lain, fungsi persuasif dan integratif berperan dalam membangun keselarasan sikap serta memperkuat hubungan antar-individu untuk meminimalisir potensi konflik. Dalam konteks lembaga pemerintahan, integrasi keempat fungsi ini menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan manajemen komunikasi ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan motivasi kerja dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi. (Sahputra, 2020)

Salah satu aspek vital dalam manajemen organisasi publik adalah fungsi pengawasan (controlling). Pengawasan internal bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan koridor hukum dan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan fungsi controlling ini mencakup supervisi dan audit secara komprehensif terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember guna memastikan efisiensi penggunaan anggaran serta kepatuhan pada prosedur yang berlaku. Namun, efektivitas pengawasan seringkali terkendala oleh hambatan komunikasi, seperti ketidakterbukaan informasi (upward communication openness), kurangnya kejujuran, serta lemahnya efisiensi media komunikasi yang digunakan. Efektivitas pengawasan internal tidak luput dari kemampuan manajer atau pimpinan dalam mengartikulasikan visi serta mengelola pola komunikasi atau hubungan antara atasan dan bawahan (superior-bawahan). (Sitasi dari Dosen Anggitaningsih et al., 2023)

Faktor penyebab ketidakefektifan sering kali berakar dari pola interaksi yang masih bersifat satu arah dan munculnya hambatan teknis saat inspeksi di lapangan. Selain itu, terdapat risiko miskomunikasi yang merugikan apabila pimpinan memberikan instruksi yang kurang spesifik atau tidak mendengarkan masukan dari bawahan, sehingga memperburuk persepsi bahwa audit adalah sebuah ancaman. Apabila proses komunikasi antara pengawas internal dan objek yang diawasi tidak berjalan secara dialogis atau bersifat satu arah, maka fungsi pengawasan cenderung dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai upaya perbaikan kualitas. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa efektivitas komunikasi harus diukur melalui indikator pemahaman, perubahan sikap, perbaikan hubungan, hingga tindakan nyata yang

kooperatif.(Ismawanti, 2021)

Inspektorat Kabupaten Jember, sebagai institusi yang memegang mandat pengawasan internal di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan prosedur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membangun pola komunikasi organisasi yang mampu menembus hambatan birokratis sehingga aliran informasi terkait temuan, evaluasi, dan rekomendasi pengawasan dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan tepat. Penguatan manajemen komunikasi organisasi melalui keterbukaan, pendengaran yang efektif, dan kualitas media komunikasi menjadi syarat mutlak untuk mengoptimalkan peran Inspektorat dalam melakukan supervisi dan audit internal.

Meskipun penelitian mengenai komunikasi organisasi telah banyak dilakukan, namun fokus pada bagaimana variabel ini secara spesifik mengintervensi efektivitas pengawasan internal di lembaga pengawas daerah masih memerlukan kajian lebih mendalam. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi yang integratif dapat mengurangi resistensi dalam proses audit dan meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal di Inspektorat Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu komunikasi organisasi dan kontribusi praktis bagi peningkatan kinerja pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai fenomena peran komunikasi organisasi dalam konteks pengawasan internal. Sebagaimana merujuk pada literatur dalam dokumen referensi, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dari perspektif informan secara holistik dan kontekstual. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana pola komunikasi (informatif, regulatif, persuasif, dan integratif) diimplementasikan untuk mencapai efektivitas pengawasan di Inspektorat Kabupaten Jember.

Penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) mengingat peran vital instansi ini sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah daerah. Subjek penelitian atau informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari unsur pimpinan (Inspektur), auditor

internal (Fungsional Auditor/P2UPD), serta staf administrasi yang terlibat langsung dalam alur komunikasi pengawasan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki kredibilitas dan kedalaman sesuai dengan fokus penelitian. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori. Data Primer, diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan mengenai praktik komunikasi organisasi dan efektivitas pengawasan yang mereka rasakan. Data Sekunder, diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan hasil pengawasan, Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi internal, serta literatur relevan yang mendukung teori manajemen komunikasi dan pengawasan.

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data seperti Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi dan aliran komunikasi (vertikal, horizontal, dan diagonal) yang terjadi di lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Jember. Wawancara, dilakukan secara terstruktur dan mendalam untuk menggali pemahaman informan terkait lima indikasi efektivitas komunikasi, yaitu pemahaman pesan, kesenangan dalam berinteraksi, pengaruh terhadap sikap kerja, perbaikan hubungan antarpegawai, dan tindakan nyata dalam tindak lanjut pengawasan. Dokumentasi, mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan struktur organisasi, kebijakan pengawasan, dan catatan korespondensi internal. (Sugiyono, 2016)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas melalui tiga tahapan utama sesuai model analisis kualitatif yang lazim digunakan dalam jurnal ilmiah. Proses diawali dengan reduksi data, yakni merangkum dan memfokuskan informasi pada hal-hal pokok yang relevan dengan variabel komunikasi organisasi serta pengawasan internal, yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian data (data display) dalam bentuk uraian singkat atau bagan untuk mempermudah pemahaman fenomena dan perencanaan langkah selanjutnya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh catatan lapangan dan data yang terkumpul untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang kredibel mengenai peran strategis komunikasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, serta menafsirkan data. Selain itu, peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara dan catatan lapangan (field notes) untuk menjaga konsistensi data. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber (membandingkan data dari informan yang berbeda) dan triangulasi teknik

(membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen). Selain itu, dilakukan diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing) untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam menafsirkan temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Implementasi komunikasi organisasi di Inspektorat Kabupaten Jember berjalan melalui pola yang terstruktur dengan mengoptimalkan empat fungsi utama, yakni informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Fungsi informatif diwujudkan melalui pendistribusian regulasi terbaru serta jadwal audit secara berkala menggunakan media internal, guna memastikan seluruh auditor memiliki basis data yang selaras sebelum melaksanakan tugas lapangan. Sebagai bagian dari rutinitas, di mana pimpinan mengadakan briefing secara teratur untuk memberikan instruksi kerja yang spesifik, komprehensif, sekaligus mengevaluasi kinerja agar auditor senantiasa termotivasi dan menjaga profesionalisme mereka. Sementara itu, fungsi regulatif diterapkan secara ketat melalui penyampaian instruksi kerja dan kode etik yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menjamin kepatuhan serta integritas prosedur pengawasan.

Dalam dinamika interaksi kerja, pimpinan menjalankan fungsi persuasif melalui komunikasi vertikal yang bertujuan memotivasi para auditor agar tetap profesional dan berintegritas tinggi. Terakhir, fungsi integratif diimplementasikan melalui koordinasi horizontal antar-unit dan tim auditor untuk menyatukan berbagai temuan audit menjadi satu laporan yang utuh, akurat, dan komprehensif. Melalui perpaduan keempat fungsi ini, proses pengawasan di Inspektorat Kabupaten Jember dapat terlaksana secara harmonis dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar komunikasi organisasi menjadi landasan utama pimpinan Inspektorat dalam menyusun struktur pesan yang jelas agar Standar Operasional Prosedur (SOP) dipahami secara seragam.(Muspawi et al., 2023) Kesamaan persepsi antardivisi ini kemudian dikelola secara disiplin melalui strategi komunikasi formal yang terencana guna memastikan setiap tahapan audit berjalan sesuai koridor dan tidak melenceng dari target utama institusi.(Arief, 2021) Guna mendukung distribusi instruksi yang lebih cepat dan transparan, transformasi dari praktik pencatatan manual menuju pemanfaatan teknologi informasi digital kini mulai diintegrasikan secara masif di lingkungan pengawasan daerah.(Fahlevvi et al., 2025) Transformasi media komunikasi inilah yang menjadi fasilitas utama dalam menjamin kejelasan pesan dan meminimalisir ambiguitas operasional sehari-hari.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi organisasi berperan signifikan sebagai faktor pendorong (booster factor) bagi efektivitas pengawasan internal di Inspektorat Kabupaten Jember. Aliran informasi yang transparan dan dua arah terbukti meningkatkan pemahaman auditor terhadap target pengawasan, sehingga meminimalisir kesalahan interpretasi atas temuan di lapangan. Selain itu, penerapan fungsi regulatif yang konsisten memastikan setiap proses audit berjalan sesuai standar operasional, yang merupakan pilar utama dalam fungsi manajemen pengawasan (controlling).

Di sisi lain, penguatan komunikasi integratif dan persuasif antara Inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai objek pengawasan telah berhasil mereduksi resistensi serta konflik, sehingga menciptakan iklim kerja yang lebih dialogis, kooperatif, dan kondusif. Dalam praktiknya, penyampaian temuan hasil pemeriksaan kepada OPD dilakukan secara sangat transparan. Apabila muncul perbedaan pendapat di lapangan, tim auditor mengedepankan pendekatan shared understanding (pemahaman bersama) yang bersifat dialogis dan partisipatif untuk mencegah eskalasi konflik. Secara keseluruhan, efektivitas komunikasi ini tidak hanya memperbaiki hubungan antarpegawai, tetapi juga meningkatkan kecepatan respons organisasi melalui aliran informasi yang lancar. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap ancaman atau penyimpangan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Indikator nyata dari keberhasilan pola pengawasan ini terwujud dalam tingginya komitmen penyelesaian laporan sesuai jadwal, serta adanya tindak lanjut rekomendasi yang kooperatif dari pihak OPD yang diperiksa.

Keberhasilan iklim komunikasi dalam meminimalisir kesalahan interpretasi membuktikan bahwa kelancaran aliran informasi institusional merupakan faktor esensial yang memengaruhi peningkatan efektivitas kerja para auditor di lapangan. (Pandapotan Sitompul, 2023) Pendekatan komunikasi yang berkarakter dialogis dan partisipatif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam resolusi konflik sosial untuk meredam resistensi psikologis selama pemeriksaan berlangsung. (Dewi et al., 2020) Tingginya produktivitas dan koherensi tim pengawas ini ternyata sangat ditopang oleh gaya kepemimpinan yang adaptif dalam memotivasi bawahannya melalui saluran komunikasi vertikal yang apresiatif. (Mahmudah, 2015)

Penerapan komunikasi yang terstruktur ini secara empiris mampu menyelaraskan dimensi-dimensi pengawasan internal sehingga menghasilkan output evaluasi kinerja yang dapat diukur secara komprehensif. (Mifti et al., 2009) Kualitas hubungan interaktif antartim memungkinkan transfer pengetahuan teknis berjalan lebih efisien, yang berujung pada

tingginya komitmen penyelesaian tugas laporan sesuai jadwal operasional. (Resi Yudhaningsih, 2019) Hal ini memposisikan komunikasi bukan sekadar prosedur pelengkap administratif, melainkan tulang punggung operasional yang menjamin terwujudnya objektivitas dalam setiap tahapan audit keuangan pemerintah

Pembahasan

Komunikasi merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan fungsi manajemen pengawasan (controlling). Di Inspektorat Kabupaten Jember, komunikasi organisasi berfungsi sebagai penghubung antar-komponen yang memiliki wewenang berbeda agar tetap berjalan selaras menuju akuntabilitas publik. Secara teoretis, pencapaian target pengawasan yang efektif sangat bergantung pada seberapa baik pesan-pesan organisasional dikelola untuk menggerakkan aparatur. Komunikasi organisasi yang sehat mendukung terciptanya indikator profesionalisme tersebut, khususnya dalam menjaga "hubungan dengan rekan seprofesi" secara objektif demi meningkatkan mutu audit pengawasan. (Sitasi dari Dosen Raggi Armanda, 2014) Ketika kemampuan berkomunikasi telah menjadi budaya organisasi dan keterampilan yang terus disempurnakan, efektivitas pengawasan internal akan lebih mudah dicapai karena adanya keselarasan sikap dan tindakan dari seluruh anggota organisasi.

Komunikasi organisasi bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen inti dalam mencapai efektivitas organisasi. Di Inspektorat Kabupaten Jember, manajemen komunikasi yang sistematis memungkinkan sumber daya manusia (auditor) bergerak secara sinkron menuju pencapaian visi institusi. Secara teoretis, keberhasilan ini dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi yang telah menjadi budaya organisasi, di mana setiap anggota organisasi memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik untuk mendukung kualitas layanan publik.

Efektivitas pengawasan internal sangat bergantung pada kualitas hubungan yang dibangun melalui komunikasi. Ketika fungsi komunikasi informatif dan integratif berjalan optimal, transparansi informasi meningkat, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas hasil audit. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif proses komunikasi dalam mengarahkan tindakan anggota sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, penguatan pada aspek manajemen komunikasi di Inspektorat Kabupaten Jember secara langsung berkorelasi positif dengan kualitas pengawasan internal yang dihasilkan.

Pencapaian tujuan organisasi di lingkungan birokrasi, khususnya dalam fungsi pengawasan, sangat bergantung pada seberapa efektif proses komunikasi dilakukan untuk menggerakkan sumber daya manusia menuju target yang diinginkan. Komunikasi organisasi

di Inspektorat Kabupaten Jember berfungsi sebagai booster factor atau pendorong kinerja yang mengubah input informasi menjadi output pengawasan yang berkualitas. Dalam perspektif manajemen modern, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai pertukaran pesan, melainkan sebagai alat manajemen untuk mengendalikan perilaku anggota agar tetap berada pada koridor pencapaian visi institusi.

Implementasi fungsi informatif dan regulatif dalam pengawasan internal selaras dengan teori bahwa manajemen komunikasi harus mampu memfasilitasi hubungan antar-komponen organisasi untuk membangun lingkungan yang mendukung pengembangan internal. Hal ini krusial mengingat pengawasan internal merupakan salah satu pilar utama manajemen selain perencanaan dan pengorganisasian. Melalui komunikasi yang efektif, potensi hambatan audit seperti ketidakterbukaan data atau resistensi dari objek yang diawasi dapat diminimalisir melalui fungsi persuasif dan integratif yang mampu membangun pemahaman bersama (*shared understanding*). Untuk mencapai kondisi tersebut, Inspektorat menerapkan strategi pembinaan berkesinambungan melalui pembiasaan dialog yang konstruktif. Dukungan dari gaya kepemimpinan yang adaptif dan komunikatif memegang peran sentral dalam meredam resistensi psikologis selama proses audit berlangsung.

Lebih lanjut, efektivitas organisasi di Inspektorat Kabupaten Jember tercermin dari kemampuan institusi dalam mengenali masalah atau ancaman secara dini melalui aliran informasi yang lancar. Keberhasilan suatu organisasi profesional dalam menjalankan fungsi kontrolnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi dikelola secara rasional dan sistematis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Auditor internal memainkan peran strategis dalam menjaga efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi dan peningkatan kepuasan kerja auditor internal membutuhkan dukungan organisasi yang berorientasi pada pengembangan karir, kejelasan peran, dan iklim kerja partisipatif. (Sitasi dari Dosen Farizi & Purba, n.d.). Ketika komunikasi organisasi telah menjadi budaya dan keterampilan yang terus disempurnakan oleh para auditor, maka kualitas layanan publik dan akuntabilitas daerah akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, integrasi antara manajemen komunikasi yang baik dengan fungsi pengawasan internal merupakan syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sejalan dengan dinamika lapangan, tingginya tingkat komitmen dan kuatnya budaya organisasi bertindak sebagai ikatan emosional yang terus mendorong auditor untuk mempertahankan integritas profesionalnya. (Resi Yudhaningsih, 2019) Integrasi yang kuat antara budaya komunikasi yang sehat dengan standar operasional menjadikan pengawasan internal sebagai sebuah dimensi kinerja strategis yang memiliki tolok ukur evaluasi yang sangat

jelas. Melalui pembiasaan dialog yang konstruktif dan terbuka, entitas pengawasan mampu merespons dan beradaptasi lebih cepat terhadap berbagai perubahan regulasi birokrasi maupun tantangan teknis saat melakukan inspeksi mendadak.

Lebih jauh lagi, berbagai saluran interaksi internal di lingkungan Inspektorat dikonstruksikan sebagai wadah utama untuk mengeksekusi strategi internalisasi nilai-nilai dasar kepatuhan moral dan etika profesi aparatur sipil negara.(Mughny Halim, 2025) Penanaman nilai-nilai fundamental yang dilakukan secara berkesinambungan melalui instruksi lisan dan teladan pemimpin ini menjadi pondasi krusial untuk menjaga independensi auditor dari berbagai tekanan pihak eksternal. Secara konseptual, sinergi yang sempurna antara manajemen komunikasi berbasis integritas dengan fungsi pengawasan akan senantiasa memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang benar-benar bersih, responsif, dan berwibawa.(Arief, 2021)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi memainkan peran yang sangat fundamental sebagai booster factor atau pendorong utama bagi efektivitas pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jember. Implementasi empat fungsi komunikasi utama, yakni fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif, terbukti mampu memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menciptakan aliran informasi yang transparan. Pendekatan komunikasi yang persuasif dan integratif ini sangat efektif dalam mereduksi resistensi dari objek pengawasan (Organisasi Perangkat Daerah), sehingga menciptakan iklim kerja yang lebih dialogis, kooperatif, dan kondusif.

Peningkatan efektivitas pengawasan ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kerja sumber daya manusianya, di mana komunikasi internal yang efektif akan mendorong kinerja pegawai melalui peningkatan pemahaman terhadap tujuan organisasi, arah strategis, dan peran individu dalam mencapai sasaran bersama.(Andi Putri Djohar Tenri Waru, Dkk. 2024) Selain pemahaman tujuan, kelancaran komunikasi ini sangat ditunjang oleh iklim keterbukaan; transparansi dan komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota organisasi merupakan faktor krusial yang dapat meminimalisir ketidakjelasan pesan (message ambiguity) serta memperlancar koordinasi antarunit.(Farida Jasmine Razak et al., 2025)

Lebih jauh lagi, keberhasilan komunikasi organisasi dalam sebuah instansi pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh komitmen organisasi yang kuat dan sistem pengendalian internal yang terencana dengan baik, karena kedua elemen

ini secara nyata berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi dinas. Ketika komunikasi yang transparan ini diiringi oleh komitmen pegawai dan pengawasan yang disiplin, maka akan terbentuk sebuah budaya organisasi produktif yang mampu memperkuat penerapan good governance dalam instansi tersebut.

Pada tataran praktis operasionalnya, efektivitas pencapaian target ini sangat bergantung pada kejelasan komunikasi vertikal maupun horizontal; di mana pimpinan yang secara rutin memberikan instruksi kerja yang komprehensif, spesifik, serta bersedia mendengarkan masukan atau keluhan dari bawahan, akan terhindar dari risiko miskomunikasi yang merugikan.(Ginting et al., 2024) Pada akhirnya, sinergi yang kokoh antara manajemen komunikasi yang berkarakter partisipatif, tingginya komitmen aparatur, dan kuatnya pengendalian internal merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang benar-benar bersih, akuntabel, responsif, dan berwibawa. Ke depannya, diharapkan terbangun sistem jaringan komunikasi yang mampu secara total menembus segala bentuk hambatan birokratis, sehingga setiap temuan dan rekomendasi pengawasan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran oleh OPD terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Putri Djohar Tenri Waru, Ria Andriani, Y. J. (2024). Pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 12–16. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i1.549>
- Arief, A. M. (2021). Communication strategy of the National Narcotics Agency (BNN) in overcoming drug users in Bengkulu City. *Jurnal Hukum*, 7(2), 41–46.
- Dewi, A., Hidayat, R., Widhagdha, M. F., & Purwanto, W. (2020). Dinamika komunikasi dalam resolusi konflik sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.33-38>
- Fahlevvi, M. R., Kusuma, K. A. P. I., & Anugerah, M. W. (2025). Integrasi teknologi digital dalam pengawasan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 236–249. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.687>
- Farida Jasmine Razak, Imam Mukti, & Nurdyansa. (2025). Analisis efektivitas komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi (Studi kasus di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 452–464. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.498>
- Fauzan Ahmad Siregar, L. U. (2021). Peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik. *Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan*, 5(2), 163–174. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.147>
- Ginting, E. E., Lubis, S., & Nisa, J. (2024). Peranan komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara. *Jurnal Creative Agung*, 14(2), 145–152.

- Ismawanti, R. (2021). Penguatan manajemen komunikasi organisasi dalam mengoptimalkan motivasi kinerja pegawai PT. Telkom Indonesia Tbk Divreg 3 Jawa Barat. *LINIMASA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
<https://doi.org/10.23969/linimasa.v4i1.3485>
- Mahmudah, D. (2015). Komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 19(2), 285.
<https://doi.org/10.31445/jskm.2015.190210>
- Mifti, S., Lestariyo, N. B., & Kowanda, A. (2009). Pengawasan internal dan kinerja (suatu kajian di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3), 114–124.
- Mughny Halim, M. (2025). Strategi internalisasi nilai BerAKHLAK untuk penguatan pengawasan internal Inspektorat Setjen DPD RI. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 5(1), 127–143. <https://doi.org/10.35912/rambis.v5i1.4588>
- Muspawi, M., Aryati, D., Gulo, C. A., & Hasanah, H. (2023). Konsep dasar komunikasi organisasi. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 12(2), 58–66.
- Pandapotan Sitompul, D. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja perawat pada Rumah Sakit Mitra Sehati Medan. *Jurnal Manajemen*, 2(2), 102–120.
- Resi Yudhaningsih. (2019). Peningkatan efektivitas kerja melalui komitmen, perubahan dan budaya organisasi. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(1), 40–51.
- Sahputra, D. (2020). Manajemen komunikasi: Suatu pendekatan komunikasi. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 152–162.
<https://doi.org/10.31289/simbolika.v6i2.4069>
- Anggitaningsih, R., Irawan, B., Prihatini, D., & Barokah, I. (2023). Pengaruh balanced scorecard pengertian kinerja karyawan dengan sistem karir dan sistem kompensasi sebagai moderasi variabel. *Quality – Access to Success*, 24(192), 306–316.
<https://doi.org/10.47750/QAS/24.192.36>
- Armanda, U. R. (2014). Pengaruh etika profesi, pengetahuan, pengalaman, dan independensi terhadap auditor judgement pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan. 12(1), 76–90.
- Farizi, S., & Purba, R. S. (n.d.). Komitmen terhadap kepuasan kerja auditor. 100–106.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.